

Lembaga Seni Budaya Muslim Indonesia dalam Perkembangan Kesusastraan di Indonesia Tahun 1962-1966

Dede Wiyanto

Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia

dedewiyan31@gmail.com

Samudra Eka Cipta*)

Sekolah Tinggi Tarbiyah Nisantara Bekasi, Indonesia

samudraeka97@gmail.com

*) *Corresponding Author*

Abstract: *This disscouses examines how the Indonesian Muslim Cultural Arts Institute in Developing Literature in Indonesia in 1962-1966 along with the cultural divisions between various cultural institutions in Indonesia. The government's policy in responding to the literary crisis has made artists and cultural observers aggressively establish cultural institutions, differences in views between artists have made Nahdatul Ulama, which is currently modernizing culture, moved to establish the Indonesian Muslim Cultural Arts Institute (Lesbumi). The government cannot further prohibit the establishment of Lesbumi, because in its movement Lesbumi is based on divinity and humanity. Even though Lesbumi is experiencing rapid development, the core board members and members are more focused on pursuing their respective fields and making the work published by Lesbumi outnumbered when compared to other Cultural Institutions. However, Djamaluddin Malik's role as chairman of the leadership of Lesbumi had a major impact by establishing a film studio. Together with his two friends, Usmar Ismail, and Asrul Sani, Djamaluddin Malik developed Lesbumi in the film industry in Indonesia. When faced with competition from foreign films, Lesbumi through Studio Persari managed to make several high-quality films.*

Keyword: *Lesbumi, Literature, Cultural Institutions.*

Abstrak: Kajian ini mengkaji bagaimana Institut Seni Budaya Muslim Indonesia dalam Mengembangkan Kesusastraan di Indonesia pada tahun 1962-1966 beserta perpecahan budaya antara berbagai lembaga kebudayaan yang berada di Indonesia. Kebijakan pemerintah dalam menyikapi krisis kesusastraan telah membuat para seniman dan budayawan gencar mendirikan lembaga kebudayaan, perbedaan pandangan antara para seniman membuat Nahdatul Ulama yang sedang melakukan modernisasi kebudayaan bergerak untuk mendirikan Lembaga Seni Budayawan Muslim Indonesia (Lesbumi). Pemerintah tidak bisa melarang lebih jauh berdirinya Lesbumi, karena Lesbumi dalam pergerakannya melandaskan pada ketuhanan dan kemanusiaan. Meskipun Lesbumi mengalami perkembangan yang pesat, namun para pengurus inti beserta anggota-anggotanya lebih fokus untuk menekuni bidangnya masing-

masing dan membuat karya yang diterbitkan Lesbumi kalah banyak jika dibandingkan dengan Lembaga Kebudayaan lain. Akan tetapi peran Djamaluddin Malik sebagai ketua pimpinan Lesbumi memberikan dampak besar dengan mendirikan studio film. Bersama dengan kedua temannya, Usmar Ismail, dan Asrul Sani, Djamaluddin Malik mengembangkan Lesbumi dalam industri perfilman di Indonesia. Ketika mendapat persaingan dari film-film Asing, Lesbumi melalui Studio Persari berhasil membuat beberapa film yang berkualitas.

Kata Kunci: Lesbumi, Kesusastraan, Lembaga Kebudayaan.

Pendahuluan

Pada masa menjelang kemerdekaan tahun 1945 sampai munculnya peristiwa G30S yang melibatkan PKI (Partai Komunis Indonesia) pada tahun 1965, sejarah Indonesia lebih banyak diwarnai dengan gejolak Pertentangan Kebudayaan. Dalam periode tersebut, terdapat hubungan yang berkaitan antara kebudayaan, sastra, dan politik (Syarifuddin et al., n.d.). Adanya keterikatan tersebut membuat kebudayaan telah dimanfaatkan sebagai alat tindakan politik oleh sebagian golongan.

Chisaan (2008) mengemukakan bahwa pengamatan terhadap fenomena yang terjadi pada masa “Demokrasi Terpimpin” menunjukkan bahwa seni budaya telah dimanfaatkan secara ekstensif sebagai alat tindakan politik. Di masa itu partai-partai politik yang mempunyai pengaruh luas berperan penting dalam fenomena yang marak terjadi pada masa demokrasi terpimpin. Susanto dalam tulisannya menyebutkan pada masa itu, setidaknya beberapa partai besar masuk ke dalam keadaan ini. Lebih lanjut, Susanto (2018) menjelaskan bahwa:

“Partai Nasional Indonesia (PNI) memiliki Lembaga Kebudayaan Nasional (LKN), Partai Komunis Indonesia (PKI) memiliki Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra), Partai Nahdatul Ulama (NU) Lembaga Seniman Budayawan Muslim Indonesia (Lesbumi), Partai Masyumi memiliki Majelis Syuro Muslimin Indonesia, Partai Katolik memiliki Lembaga Kebudayaan Indonesia Katolik (LKIK), Partai Indonesia (Partindo) memiliki Lembaga Seni Budaya Indonesia (Lesbi), Partai Tarbiyah Islamiyah (Perti) memiliki Lembaga Kebudayaan dan Seni Islam (Leksi). Selain itu, ada pula sejumlah seniman ataupun budayawan yang tidak bergabung dengan partai-partai tersebut. Mereka memilih jalan sendiri untuk berkeaktivitas ataupun membentuk satu kelompok yang tidak terikat dengan partai.”

Pada periode 1960-an, sebagai bentuk reaksi terhadap pergerakan Lekra, para seniman dan budayawan muslim dibawah naungan Nahdatul Ulama (NU) membentuk organisasi yaitu Lembaga Seni Budaya Muslim Indonesia (LESBUMI). Lebih lanjut Goncing (2015) mengemukakan tentang tujuan utama Lesbumi adalah untuk menghadapi aksi dari golongan front kiri. Sedangkan, keunikan yang menjadi perbedaan antara Lesbumi dengan Lekra, Manifes Kebudayaan, dan yang lain adalah kuatnya nilai “religius” dalam kreasi seni budayanya. Langkah yang diambil oleh

Lesbumi terkesan sama dengan pandangan *Ahlussanah wal Jamaah* (Aswaja) yang menjadi dasar keagamaan NU (Huda et al., 2022) menambahkan bahwa

“Berdirinya Lesbumi pada tahun 1962 itu dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Untuk faktor eksternal yaitu: pertama, penyampaian Soekarno tentang Manifesto Politik pada tahun 1959. Kedua, Nasakom mulai mengendalikan tata kehidupan di seluruh aspek Indonesia pada awal tahun 1960-an, dan ketiga, pertumbuhan Lekra (Lembaga Kebudayaan Rakyat) yang semakin menampakkan hubungan dengan PKI baik secara kelembagaan maupun ideologis. Sedangkan untuk faktor internal yaitu: pertama, kalangan para ulama membutuhkan pendampingan dari para seniman dan budayawan yang menekuni bidang seni dan budaya. Kedua, NU membutuhkan modernisasi kebudayaan.”

Akhirnya pada tanggal 25-28 Juli 1962 diselenggarakanlah Musyawarah Besar I Lesbumi. Adapun pokok bahasan yang didiskusikan dalam musyawarah tersebut ialah tentang tujuan dari organisasi Lesbumi yang berupaya ingin menyatukan beragam artis, pelukis, seniman, budayawan, sastrawan, serta ulama yang menekuni bidang seni dan budaya (Jurnaliston & Suliyati, 2021). Lebih lanjut, Chisaan (2008) memaparkan hasil susunan kepengurusan setelah dilakukan musyawarah selama 4 hari, diantaranya Djamaluddin Malik yang terpilih menjadi Ketua, Usmar Ismail menjadi Wakil Ketua I, dan Asrul Sani yang menjabat sebagai Wakil Ketua II. Sementara itu, posisi sekretaris diisi oleh Hasbullah Chalid, bendahara diduduki oleh H. Mohd. Madehan, dan tokoh-tokoh yang lain seperti H. Tubagus Mansur Maknun, H. Mahbub Djunaidi, H. Husny, masuk ke dalam jajaran anggota Lesbumi.

Kenyataan tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi penulis agar lebih lanjut lagi meneliti Lesbumi dalam bentuk skripsi. Bagaimana tidak, saat Lekra dan Manifes Kebudayaan sudah terlihat ada gejala pertentangan dengan saling menyebarluaskan gagasan-gagasan, Lesbumi seakan menjadi jalan tengah oleh kaum seniman dan pengarang dalam mengekspresikan aktivitas seni, budaya, dan sastra mereka di tengah-tengah pertarungan politik-budaya pada saat itu (Jurnaliston & Suliyati, 2021). Apalagi nampaknya sastrawan di Lesbumi sedang mencoba mengenalkan tradisi baru dalam mengekspresikan seni budaya mereka, hal ini diungkapkan oleh sikap Lesbumi terhadap Manifes Kebudayaan dengan mengatakan bahwa Lesbumi ‘Tidak berpedoman pada slogan kata untuk kata, puisi untuk puisi’. Alasannya karena mereka ‘tidak ingin menghilangkan unsur sastra dari fungsi untuk menyebarkan pada masyarakat berupa fungsi sosial dan komunikatif’ (Sani, 2000). Hal ini menegaskan bahwa sikap terpenting yang menjadi ciri khas dalam Lesbumi adalah sosok pribadi seniman dan budayawan yang dipergunakan untuk menjelaskan suatu fenomena yang kemudian ingin disampaikan kepada rakyat Indonesia.

Selain itu upaya Lesbumi melalui Usmar Ismail dan Asrul Sani dalam mengarsipkan sebuah film sangat rapih jika dibandingkan dengan Lekra dan Manifes Kebudayaan. Namun demikian, timbul sebuah pertanyaan baru tatkala penulis

menemukan fakta bahwa terbitan yang dikeluarkan oleh Lesbumi lebih sedikit jika dibandingkan dengan Lekra dan Manifes Kebudayaan, padahal upaya Usmar Ismail dan Asrul Sani dalam mengarsipkan sebuah film sangat rapih jika dibandingkan dengan Lekra. Usmar Ismail dan Asrul Sani sering sekali menjadwalkan rutin untuk mengunjungi Sinematex yang merupakan pusat bagi data, dan informasi perfilman Indonesia

Selanjutnya, alasan penulis mengambil tahun 1962 sebagai awal dari pembahasan karena pada tahun tersebut adalah tahun ketika berdirinya Lesbumi. Sementara tahun 1966 diambil sebagai akhir dari pembahasan karena pada tahun tersebut sempat terjadi kekosongan kepemimpinan. Djamaluddin Malik yang saat itu menjadi Ketua tengah menderita penyakit komplikasi. Usmar Ismail yang menjabat sebagai Wakil Ketua I lebih banyak aktif dalam Perusahaan Perfilman Indonesia. Sedangkan Asrul Sani, keaktifannya dalam Lesbumi mengantarkan Asrul Sani menjadi anggota DPR-GR/MPRS tahun 1966 sebagai wakil seniman dari Lesbumi (Suyono dkk, 2016).

Masalah utama yang dikaji dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Lembaga Seni Budaya Muslim Indonesia dalam Mengembangkan Kesusastraan di Indonesia tahun 1962-1966”, untuk memfokuskan kajian penelitian ini, maka penulis mengembangkannya dalam beberapa pertanyaan penelitian, yaitu (1). Bagaimana latar belakang didirikannya Lembaga Seni Budaya Muslim Indonesia? (2). Bagaimana respon pemerintah terhadap berdirinya Lembaga Seni Budaya Muslim Indonesia? (3). Mengapa pada tahun 1962-1966 karya yang diterbitkan oleh Lembaga Seni Budaya Muslim Indonesia lebih sedikit jika dibandingkan dengan Lembaga Kebudayaan Rakyat dan Manifes Kebudayaan? (4) Bagaimana upaya para seniman dalam memajukan Lembaga Seni Budaya Muslim Indonesia di bidang kesusastraan tahun 1962-1966?

Hasil penelitian ini dapat digunakan pada pembelajaran sejarah di sekolah khususnya pada tingkat Sekolah Menengah Atas kelas XII, dimana dapat menunjang materi tentang upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Penelitian ini juga dapat memperkaya kajian tentang perkembangan organisasi Lesbumi dalam bidang kesusastraan, kehidupan para seniman pada masa tahun 1960-an, dan juga alasan dibentuknya Lesbumi.

Metode

Metode penelitian penulis merupakan metode historis atau metode sejarah. Garraghan (dalam Wasino & Hartatik) memaparkan bahwa metode sejarah dapat didefinisikan sebagai suatu kumpulan yang sistematis dari prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang dimaksudkan untuk membantu dengan secara efektif dalam pengumpulan bahan-bahan sumber dari sejarah, dalam menilai atau menguji sumber-sumber itu secara kritis, dan menyajikan suatu hasil “*sinthese*” dari hasil-

hasil yang dicapai.

Sjamsuddin (2012) memaparkan bahwa tahapan dari metode historis (sejarah) adalah sebagai berikut;

1. Heuristik, merupakan tahapan pencarian sumber bagi peneliti, dikarenakan dalam tahapan pencarian sumber tersebut peneliti mencari ke berbagai perpustakaan dan toko buku di Kota Bandung, maupun luar Kota Bandung yaitu Jakarta, dan Cirebon.
2. Kritik Sumber, merupakan tahap pemilahan terhadap sumber-sumber yang telah didapatkan sebelumnya dari kegiatan heuristik. Dalam tahapan ini penulis berusaha mencari validitas dan relevansi dari sebuah sumber. Sehingga dapat menghasilkan fakta-fakta terkait hal yang peneliti cari. Tahap ini terbagi dalam dua bagian, yaitu tahap kritik eksternal dan tahap kritik internal.
3. Historiografi, tahapan ini merupakan tahapan terakhir dalam metode sejarah. Tahapan tersebut merupakan pemaparan dalam bentuk tulisan oleh seorang peneliti dengan berdasarkan fakta yang telah didapatkan sebelumnya sehingga menghasilkan sebuah cerita sejarah yang mudah dipahami dan menarik untuk dibaca.

Dalam proses mengumpulkan data dan informasi mengenai penulisan skripsi tentang Lesbumi dalam Mengembangkan Kesusastraan di Indonesia, penulis menggunakan Teknik studi literatur atau studi pustaka dan studi dokumentasi. Danial (2009) menjelaskan bahwa studi pustaka adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan sejumlah buku-buku, majalah, literatur, yang berkenaan dengan masalah dan tujuan penelitian. Sumber data kemudian akan diolah dan dianalisis. Studi Pustaka yang dilakukan dengan mencari buku-buku yang relevan dan sesuai dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu Lesbumi dalam Mengembangkan Kesusastraan di Indonesia. Berkaitan dengan ini, dilakukan kegiatan kunjungan ke perpustakaan-perpustakaan yang berada di wilayah Bandung, Jakarta dan Cirebon. Di Bandung, penulis mengunjungi Perpustakaan Universitas Pendidikan Indonesia, Perpustakaan Jurusan Pendidikan sejarah FPIPS UPI, Perpustakaan Pengurus Cabang Nahdatul Ulama, dan Perpustakaan Batu Api.

Selain itu, di Bandung, penulis mengunjungi kediaman peminat budaya sunda, Iip D Yahya. Di Jakarta, penulis melakukan kunjungan ke Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas). Sementara itu, di Cirebon, penulis mengunjungi perpustakaan yang berada di IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Setelah mengumpulkan berbagai data dan membuatnya cukup relevan sebagai referensi untuk penulisan ini, maka penulis kemudian mulai mempelajari, mengkaji, mengidentifikasi, dan memilih bahan relevan yang dapat digunakan dalam penulisan (Oktaviani, n.d.). Selain itu, penulis juga menggunakan studi dokumentasi yang dilaksanakan oleh penulis ketika melakukan kunjungan ke Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) yang berada di Jakarta.

Hasil dan Pembahasan

Pada tanggal 17 Agustus 1959, Presiden Soekarno berpidato menjelaskan salah satu kebijakan demokrasi terpimpin yang dikenal dengan nama '*Manifesto Politik*' (Manipol). Ricklefs (2008) memaparkan bahwa dalam pidatonya, Soekarno menyuarakan agar dibangkitkannya kembali semangat untuk melakukan revolusi, keadilan sosial, serta pendirian lembaga dan organisasi negara. Hal itu dilakukan untuk menciptakan revolusi yang berkelanjutan. Selain hal itu, Soekarno dalam pidato yang bertema "Penemuan kembali Revolusi Kita" juga mengajak para seniman dan budayawan untuk menentang imperialisme ekonomi, politik, kebudayaan sembari menyisipkan kalimat-kalimat agar mendukung kabinet baru yang bernama 'Kabinet Kerja'. Dikeluarkannya Manipol juga dapat dikatakan sebagai pengaruh dari adanya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dengan adanya Dekrit Presiden membuat negara mempunyai otoritas hukum untuk melindungi bangsa Indonesia dari resiko yang menimbulkan negara berantakan (Afidah, 2023).

Dekrit presiden yang disampaikan Soekarno menimbulkan berbagai macam pandangan dari para sastrawan dan budayawan. Akibat adanya perbedaan pandangan dari para sastrawan dan budayawan, serta pada saat itu juga menjelang pemilu pertama yang hasilnya terdapat 27 partai, Soekarno kemudian mengeluarkan sebuah peraturan untuk meletakkan partai politik di bawah pengawasannya, yaitu 'Peraturan Penyederhanaan Kepartaian'.) setelah membubarkan PSI dan Masyumi (Taum, 2013), Soekarno hanya memperbolehkan sepuluh partai politik saja untuk ada di Indonesia, diantara yaitu: Partai Nasional Indonesia (PNI), Nahdatul Ulama (NU), Partai Komunis Indonesia (PKI), Partai Sosialis Islam Indonesia (PSII), Persatuan Tarbiyah Islamiyah Indonesia (PERTI), Partai Katolik, Partai Kristen Indonesia, Partai Murba, Partindo, dan Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI).

Kebijakan tersebut diambil agar Nahdatul Ulama dan partai politik lain mendukung pemerintah dengan pola kepemimpinan yang baru dan lebih memfokuskan untuk mempengaruhi masyarakat, hal ini membuat hubungan-hubungan NU ke tingkat elite atau tingkat pemerintahan hampir luput dari pengamatan aktivis NU (Goncing, 2015). Oleh karena itu, dalam rangka untuk mengamati kegiatan kebudayaan sekaligus modernitas ditubuh organisasi, NU terus berupaya memodernisasi budaya. Anwar (2013) mengatakan bahwa semenjak tidak lagi bergabung dengan Masyumi, NU telah memiliki bagian-bagian dan badan otonom yang mencerminkan perhatiannya pada masalah-masalah tertentu, antara lain; Pendidikan, dakwah, sosial, ekonomi, pertanian, perempuan, pemuda, buruh, dan lain-lain. Sebagai contoh, basis NU yang berada di pedesaan mendirikan madrasah di desa-desa guna memodernisasikan NU dalam bidang Pendidikan. Hal ini

mengindikasikan bahwa setelah lepas dari Masyumi, NU secepatnya harus melakukan modernisasi kebudayaan.

Carr (Kaprisma, n.d.) menjelaskan bahwa pada periode tersebut, tiap-tiap partai memiliki gaya bahasa masing-masing untuk memajukan kebudayaannya, pemimpin NU lebih suka menggunakan kata-kata Arab dengan atau tanpa perubahan-perubahan bentuk Indonesia. Kaum sosialis di luar partai-partai Kristen berorientasi dengan istilah Eropa seperti *existensialism*, *planning*, *avangadiste*. Sebaliknya kaum komunis lebih fleksibel dan adaktif. Dari bedanya gaya bahasa yang terdapat dalam partai-partai politik di Indonesia, para seniman dan budayawana kemudian terbelah menjadi dua aliran utama, yaitu; humanisme universal, dan realisme sosialis. Teeuw (1960, hlm. 21) secara detail menjelaskan bahwa;

“Aliran humanisme dikuasai oleh kelompok seniman Gelanggang, sedangkan aliran realisme sosialis dikuasai oleh kelompok seniman Lekra. Selain perbedaan-perbedaan asasi yang ada di antara kedua aliran ini, yakni soal tanggapan kedua pihak terhadap universalisme dan realisme, ada juga garis-garis perhubungan di antara keduanya: ‘revolusi’, ‘rakyat’, ke’baru’an, dan ke’maju’an”

Dalam memperlihatkan karya-karya sastra, realisme sosialis menentang, melawan, dan menyerang golongan pemerintahan, dan memuja serta menyokong golongan masyarakat kecil yang tertindas, serta meningkatkan konflik-konflik tersebut hingga sampai mencapai revolusi nasional. Lebih jelasnya, Toer (Rahayu, n.d.) menanggapi bahwa apa yang dilakukan oleh Lekra sesuai dengan logika, dan sesuai dengan fakta yang ada di lapangan, estetika mengambil tempat yang terakhir dalam kehidupan.

Lain hal dari Lekra yang berfalsafah kebudayaan sosialis ala Indonesia, sekelompok seniman dan budayawan yang merupakan sebagian besar dari Angkatan 45, kemudian melahirkan seni budaya kedaerahan baru bernama Manifes Kebudayaan yang berfalsafah kebudayaan Pancasila (Chisaan, 2008). Ismail (1972) memaparkan tentang dua alasan penting berkaitan dengan pencantuman Pancasila sebagai falsafah dari Manifes Kebudayaan, antara lain; pertama, sila pertama mengakui keesaan Tuhan, kedua, filsafat Pancasila adalah filsafat universal di mana segala aspek kehidupan manusia diabadikan. Meskipun Manifes Kebudayaan berusaha untuk menandingi Lekra, namun hal itu tidak dapat menggoyahkan dominasi Lekra di Indonesia.

Akhirnya dalam upaya untuk menghendaki adanya kerjasama yang baik antara ulama, seniman, dan budayawan. Chisaan (2008) menjelaskan bahwa pada tanggal 25-28 Juli 1962 diselenggarakanlah Musyawarah Besar I Lesbumi di Bandung. Anwar (2013) menjelaskan bahwa pokok bahasan yang didiskusikan dalam musyawarah tersebut ialah upaya penegasan kembali tentang tujuan didirikannya Lesbumi adalah berupaya ingin menghimpun berbagai macam artis: pelukis, bintang film, pemain

pentas dan sastrawan serta ulama yang memiliki latar belakang seni. Selain menghasilkan butir-butir keputusan dan rumusan pokok yang menjadi pegangan bagi Lesbumi, Musyawarah Besar Lesbumi juga menghasilkan semacam ‘manifesto politik’ yang diberi nama *Muqoddimah*. Chisaan (2008) menjelaskan bahwa rumusan *Muqoddimah* disusun dengan menggunakan bahasa yang tegas, menyatakan sikap politik Lesbumi dalam mendukung kebijakan yang sedang dijalankan pemerintah Indonesia.

Lebih lanjut, Chisaan (2008) memaparkan hasil susunan kepengurusan setelah dilakukan musyawarah selama 4 hari, diantaranya Djamaluddin Malik yang terpilih menjadi Ketua, Usmar Ismail menjadi Wakil Ketua I, dan Asrul Sani yang menjabat sebagai Wakil Ketua II. Sementara itu, posisi sekretaris diisi oleh Hasbullah Chalid, bendahara diduduki oleh Mohd. Madehan, dan tokoh-tokoh yang lain seperti Tubagus Mansur Maknun, Mahbub Djunaidi, Husny, masuk ke dalam jajaran anggota Lesbumi. Anam (1985) menjelaskan bahwa alasan dipilihnya Djamaluddin Malik sebagai ketua Lesbumi karena Djamaluddin adalah seorang seniman yang telah lebih dulu bergabung dengan NU dan menjabat sebagai Ketua III PBNU. Saat menjadi Ketua Umum Lesbumi, maka Djamaluddin meninggalkan Jabatan Ketua III. Oleh para ulama dan masyarakat pengikut NU, Djamaluddin diharapkan menjadi perantara bagi seniman dan budayawan.

Lesbumi, Lekra, dan Manifes Kebudayaan

Lahirnya Lesbumi di bawah naungan NU seakan menjadi ciri khas baru bagi kesenian dan kebudayaan Islam di Indonesia. Chisaan (2008) menjelaskan bahwa Lesbumi mengenalkan pandangan kebudayaan baru berupa “humanisme religius”, suatu pandangan kebudayaan yang berlandaskan pada ‘ketauhidan’ dan ‘kemanusiaan’. Pandangan humanisme religius dirasa sesuai dengan yang dikatakan Soekarno (Slamet, 2018) yang mengatakan bahwa:

“Kita bangsa Indonesia melihat apa jang terdjadi dibawah kolong langit ini dengan Declaration of Independence sadja, atau Manifesto Komunis sadja. Kita bangsa Indonesia melihat bahwa Declaration of Independence itu tidak mengandung keadilan sosial atas sosialisme, dan kita melihat bahwa Manifesto Komunis itu masih harus disublimir (dipertinggi djiwanja) dengan Ke-Tuhanan Jang Maha-Esa”.

Singkatnya, pernyataan Soekarno dalam amanat Presiden yang terjadi pada saat Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan tahun 1960 ialah dalam menjalankan Manifesto Komunis, hal yang harus disisipkan dari dibentuknya suatu Lembaga kebudayaan adalah dengan menyisipkan unsur ketuhanan yang kuat. Jadi, humanisme religius yang diusung oleh Lesbumi tidak bisa dilepaskan dari upaya pencapaian revolusi Indonesia (Syarifuddin et al., n.d.).

Meskipun dibiarkan, Soekarno tetap mencari celah untuk mengkritik Lesbumi yang berada di bawah naungan NU. Soekarno secara tidak langsung mengatakan bahwa pembangunan pesantren yang merupakan bagian dari rencana Lesbumi untuk menyebarluaskan kebudayaan adalah suatu budaya kuno yang secepatnya harus ditinggalkan oleh masyarakat. Masyarakat harus berpikir ke depan bahwa untuk memperoleh ilmu agama yang kuat, masyarakat harusnya belajar untuk pergi melihat dunia luar, bukan malah belajar di pedesaan. Lebih jelasnya, Soekarno (Susanti et al., 2019) mengatakan bahwa:

“Lepaskan saudara punja jiwa, djuga dari pada suasana pengertian pesantren itu. Naik keangkasa seperti saja ini, melihat keluar. Bukan sadja melihat ke Saudi Arabia, ke Makah dan Madinah, lihat Cairo, lihat Spanyol, lihat keseluruh dunia, lihat kesedjarah, lihat kepada djaman dahulu, djaman dahulu sedjarah dari pada bangsa-bangsa, bukan sadja hanja bangsa-bangsa Indonesia dan bangsa Arab sadja, tetapi sedjarah dari pada seluruh ummat manusia”.

Meskipun pendirian pesantren dikritik tajam oleh Soekarno, namun di lingkungan Lesbumi dan NU cenderung mengacuhkan pendapat Soekarno karena Sebagian tokoh Indonesia, contohnya Dr. Sutomo, malah berpikir pendirian pesantren justru dipandang sebagai ciri khas bangsa Indonesia (Chisaan, 2008). Apalagi Romahurmuziy dkk (2000) mengatakan bahwa upaya untuk mengembangkan kebudayaan pesantren dalam organisasi kebudayaan sudah dilakukan sejak lama oleh Ikatan Pelajar Nahdatul Ulama (IPNU) yang didirikan pada tahun 1954 dan Ikatan Pelajar Puteri Nahdatul Ulama (IPPNU) yang didirikan pada tahun 1955. Sehubungan dengan hal itu, NU tentu tidak mau hal yang telah dinanti begitu lama hilang begitu saja.

Soekarno lalu mencoba dengan cara lain, momen politik yang melahirkan Manifesto Politik pada tahun 1959 menyarankan Djamaladdin Malik agar slogan untuk kebudayaan Lesbumi adalah ‘Politik untuk Panglima’ (Chisaan, 2008). Namun Djamaluddin menolak dengan tegas, sikap itu diambil karena Lesbumi memiliki penafsiran sendiri atas Manifesto Politik yang menjadi landasan ideologis lembaga kebudayaan saat itu tidak sesuai dengan karakteristik Lesbumi yang berlandaskan ‘humanisme religius’.

Menyikapi sulitnya Lesbumi untuk dikerjasama, Soekarno mengalihkan perhatiannya pada perdebatan antara Lekra dan Manifes Kebudayaan. Menurut Herlambang (Fitra & Wendry, 2024), langkah tersebut diambil oleh Soekarno karena pada tahun 1963, seniman kiri yang tergabung di dalam Lekra turut mendukung gagasan Soekarno tentang revolusi Indonesia. Maka dari itu, tak heran jika kelompok Manifes Kebudayaan merasa dikucilkan akibat meningkatnya para seniman Lekra yang menyerang pendukung Manifes Kebudayaan melalui tulisan-tulisan. Tulisan-

tulisan tersebut kebanyakan diterbitkan di koran yang berafiliasi dengan PKI seperti *Harian Rakyat* dan *Bintang Timur* (Azhari et al., 2022).

Memang, diantara banyaknya lembaga kebudayaan pada masa itu, penulisan sejarah sastra sering kali hanya membahas dua kelompok pemikiran, yakni kelompok Lekra dan kelompok Manifes Kebudayaan, yang mana hal ini tentu tidak mewakili pluralitas pemikiran yang melandasi tindakan berkesenian. Padahal Lesbumi yang berada di bawah naungan NU juga turut memberi andil yang cukup besar dalam perkembangan kebudayaan Indonesia. Namun begitu, diantara ketiga kelompok itu, Lekra menjadi lembaga kebudayaan pertama yang didirikan di Indonesia. Lekra berdiri pada tanggal 17 Agustus 1950 yang digagas oleh D. N. Aidit, Njoto, M. S. Ashar, dan A. S. Dharta (Susanto, 2018). Menyusul kemudian Lesbumi pada akhir bulan Juli 1962, lalu Manifes Kebudayaan yang didirikan secara resmi pada tanggal 17 Agustus 1963.

Lahirnya Lekra mendapat sambutan yang positif bagi masyarakat Indonesia, termasuk juga masyarakat petani dan buruh. Susanto (2018) mengemukakan bahwa Lekra mendapatkan respon positif karena konsep Lekra memang difungsikan sebagai penggerak atau pendorong, mengajar, mendidik, dan menjadikan rakyat sebagai pahlawan. Konsep yang dibawa oleh Lekra adalah kegiatan sastra harus menjadi bagian dari kepentingan umum kaum ploretariat, Lekra harus menjadi roda kesatuan unsur daripada gabungan partai dan gabungan gabungan sosial-demokratik yang terorganisasi dan terencana.

Pada tahun 1962, Lekra kemudian mendapat tantangan dari NU yang mendirikan Lesbumi sebagai reaksi dominannya Lekra dalam lembaga kebudayaan Indonesia. NU optimis Lesbumi dapat melawan pergerakan Lekra karena Lesbumi dipimpin oleh para pemuda yang sudah ahli dalam bidangnya masing-masing. Apalagi kehadiran *Duta Masyarakat* sebagai lembar kebudayaan membawa angin segar ketika Usmar Ismail dalam majalah harian *Muara* berhasil menerbitkan “kisah putih” sebagai bentuk refleksi dan kesaksiannya terhadap sejarah perfilman Indonesia. Chisaan (2008) menjelaskan bahwa selang beberapa bulan kemudian, Usmar Ismail, Asrul Sani, dan Anas Ma'ruf menerbitkan majalah mingguan yang dinamakan dengan *Abad Muslimin*. Di samping dua media, *Duta Masyarakat* dan *Muara*, Lesbumi juga menerbitkan majalah bulanan yang dinamakan *Gelanggang*.

Dalam rubrik *Lentera*, Lekra memberi penilaian negatif terhadap sajak Chairil Anwar. Pernyataan tersebut membuat marah sekelompok seniman dan budayawan yang merupakan sebagian besar dari Angkatan 45 (Tayeb & Amaruli, 2021). Padahal Chairil Anwar mencurahkan tenaga hidupnya, sepenuh perhatiannya kepada puisi, dan sajak-sajaknya, Chairil Anwar juga bersahabat baik dengan pujangga-pujangga seluruh dunia (Junus & Junus, 2016). Akan tetapi sikap Lekra malah memberi nilai negatif terhadap sajak Chairi Anwar. Hal ini kemudian menimbulkan konflik antara

Lekra dengan Manifes Kebudayaan yang merupakan lembaga kebudayaan baru hasil bentukan dari sebagian Angkatan 45.

Lekra yang berhubungan baik dengan Presiden Soekarno pun kemudian berhasil mempengaruhi Soekarno agar bertindak tegas pada kelompok Manifes Kebudayaan. Herlambang (2013) menjelaskan bahwa pada tanggal 8 Mei 1964 Presiden Soekarno melarang Manifes Kebudayaan dan aktivitas mereka di seluruh Indonesia karena basis ideologisnya, humanisme universal, dilihat oleh Soekarno dan aliansi kirinya sebagai bahaya bagi keutuhan bangsa, yakni melanjutkan revolusi untuk melawan kekuatan-kekuatan kolonial. Keputusan tersebut tentu membuat Lekra senang, namun keberadaan Manifes Kebudayaan belum sepenuhnya bisa dibubarkan, Manifes Kebudayaan masih ada, hanya saja kali ini harus bergerak di bawah tanah. Melalui surat kabar harian Dwiwarna, secara sembunyi-sembunyi kelompok Manifes Kebudayaan menampilkan karya-karyanya dengan Novel yang berjudul *Penahlu Ujung Dunia* dan *Tanah Kesayangan* karangan Bokor Hutasuhut, esai *Silhuet* karangan Trisno Sumardjo, dan sajak *Gugur dalam Pencegatan Tahun Empat Puluh Delapan* karangan Taufik Ismail (Erneste, 1990).

Kepercayaan tinggi yang diberikan oleh Djamaluddin Malik nampaknya membuat Lesbumi mengalami kekosongan kepemimpinan akibat Djamaluddin Malik yang perhatiannya lebih banyak dicurahkan pada NU. Bahkan dalam suatu rapat harian Lesbumi pada tanggal 22 Juni 1963, pembahasan tentang pertanggung jawaban Ketua Umum Lesbumi mengemuka. Saat itu, Usmar Ismail dalam Chisaan (2008) secara tidak langsung memberikan kritik pedas terhadap kepemimpinan Lesbumi. Usmar Ismail mengatakan bahwa:

“Hendaknja praktek seperti sekarang, dimana masing2 anggota PP jang dekat dengan Pengurus Besar Nahdatul Ulama melaksanakan kbidjaksanaan sendiriz bagi Lesbumi, dapat dihentikan. Saja sendiri masih merasa kikuk dalam kedudukan saja sebagai Wk. Ketua I ini. Hendaknja Ketua kita memberikan pimpinan jang lebih tegas, supaja masing2 anggota pengurus tahu akan tanggung-djawab-nja sendiri.”

Dalam pendapatnya tersebut, nampaknya Usmar Ismail memang menindak tegas sikap Djamaluddin Malik yang harusnya menjadi teladan bagi para pengikutnya, serta memberi contoh dalam mencapai tujuan organisasi. Hal ini senada ketika Schein (dalam Thoyib, 2005) mengemukakan bahwa bila perilaku bawahan sesuai dengan program yang telah digariskan oleh pimpinan maka seni dan budaya yang diperolehnya adalah tinggi, dan sebaliknya bila perilaku individu dalam organisasi jauh dari kebenaran sebagaimana yang dituangkan dalam program kerja oleh pemimpin, maka disitu seni dan budayanya rendah. Djamaluddin Malik nampak gagal dalam mengembangkan Lesbumi sebagai organisasi kebudayaan di Indonesia sehingga kalah pamor dengan keberadaan Lekra dan Manifes Kebudayaan.

Lesbumi dalam Kesusastraan di Indonesia

Dalam upaya mengembangkan organisasi, Lesbumi sebenarnya sudah mempunyai modal awal berupa keberadaan Studio Persari. Studio persari merupakan studio yang besar dan mewah di Kawasan Polonia, Jatinegara, Jakarta. Studio ini dilengkapi dengan rumah-rumah yang kecil diperuntukkan bagi bintang-bintang atau seniman yang ingin beristirahat Susanto (2018) menjelaskan bahwa pada masa 1950-an, melalui Studio Persari, Djamaluddin Malik setidaknya mampu memproduksi film sebanyak 23 judul termasuk diantaranya adalah *Darah dan Doa* yang disutradarai oleh Usmar Ismail. Djamaluddin Malik mendirikan Persari dengan tujuan agar membuat industri film Indonesia dengan gaya Hollywood. Djamaluddin bahkan memulai kerjasama dengan negara Filipina dalam sebuah produksi film. Kondisi ini berbeda dari kebanyakan para produser film Indonesia saat itu yang masih berkuat dengan peralatan film yang sudah tua dan belum pernah terbayang untuk melangkah ke luar kandang (Asmar, 2020)

Dengan adanya Studio Persari, Lesbumi diharapkan dapat dengan mudah untuk menciptakan film-film yang berkualitas. Bersama dengan kedua orang temannya, Asrul Sani dan Usmar Ismail. Djamaluddin Malik menyoroti industri film di Indonesia, Chisaan (2008) menjelaskan bahwa Djamaluddin, Usmar Ismail berupaya menggerakkan hati pemerintah untuk mengadakan pembatasan kuota terhadap film Amerika, dari yang semula 250 film per tahun menjadi 80 film per tahun. Akan tetapi, perjuangan itu nampaknya sia-sia, setelah produksi film-film nasional tidak mampu untuk memperbanyak karya-karyanya. Namun dengan adanya sikap seperti ini membuat Lesbumi semakin dikenal oleh lembaga-lembaga kebudayaan sekitarnya.

Selanjutnya dalam bidang penerbitan, Lesbumi menghadirkan surat kabar kebudayaan yang bernama *Duta Masyarakat*, dan majalah Gelanggang yang dipimpin oleh Asrul Sani (Syarifuddin et al., n.d.). *Duta Masyarakat* merupakan surat kabar harian berisi tentang isu-isu yang terjadi di Indonesia. Bagi pemerintah, *Duta Masyarakat* juga secara tidak langsung menjadi alat media massa untuk menyebarluaskan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia. Sebagai contoh saat *Duta masyarakat* memberi kolom khusus yang berjudul *Dibawah Ridho-Nja Allah Subhanahu Wata'ala 2 Atjara Triprogram Pemerintah Telah Terlaksana* atau saat Kartosoewiryo yang dijatuhi hukuman mati, *Duta Masyarakat* juga mempublikasikan suasana yang terjadi pada saat itu.

Kehadiran *Duta masyarakat* sebagai lembar kebudayaan membawa angin segar ketika Usmar Ismail dalam majalah harian *Muara* berhasil menerbitkan “kisah putih” sebagai bentuk refleksi dan kesaksiannya terhadap sejarah perfilman Indonesia. Chisaan (2008) menjelaskan bahwa selang beberapa bulan kemudian, Usmar Ismail, Asrul Sani, dan Anas Ma'ruf menerbitkan majalah mingguan yang dinamakan dengan *Abad Muslimin*. Di samping dua media, *Duta Masyarakat* dan *Muara*, Lesbumi juga

menerbitkan majalah bulanan yang dinamakan *Gelombang*. Namun, redaksi yang dipimpin oleh Asrul Sani itu hanya mampu terbit tiga nomor saja, sedangkan untuk yang berbentuk buku belum satu pun bisa untuk diterbitkan (Rosidi, 2017, hlm. 191). Kenyataan minimnya jumlah karya yang diterbitkan oleh *Duta Masyarakat* dikarenakan baik Djamiluddin Malik, Usmar Ismail, dan Asrul Sani lebih tertarik untuk menggeluti dunia film dan teater. Barangkali karena terdapat aspek “penulisan skenario” maka bidang teater dan film ini dinilai masih ada hubungannya dengan sastra. Menurut Asrul Sani, hubungan sastra, teater, dan film cukup rumit untuk dijelaskan. Masalahnya, mencari hubungan antara sastra, teater, dan film berarti harus menghadapi suatu persoalan yang gila. Sulistiyati (Jurnaliston & Suliyati, 2021) menjelaskan bahwa:

“Ada unsur-unsur dalam kesusasteraan yang kemudian kita temui kembali dalam film, sandiwara, atau radio. Unsur itu ialah “unsur bercerita. Seperti pengarang roman atau novel bercerita, maka kombinasi penulis skenario dan sutradara film juga menyampaikan cerita. Sebuah unsur kesusasteraan tentu belum lagi dapat disebut kesusasteraan, seperti juga hanya garis dan warna belum lagi dapat disebut seni lukis. Karena menurut hemat saya hanya pembicaraan yang bermanfaat dari perbandingan unsur-unsur kesusasteraan - dalam hal ini cerita yang dapat membawa kita kepada pembicaraan yang bermanfaat, maka itu saya tafsirkan sebagai berikut: yaitu kita akan membicarakan masalah cerita atau penyampaian cerita dalam sandiwara pentas, radio, dan film, dengan kesusasteraan sebagai titik pertolakan”.

Pernyataan yang disampaikan oleh Asrul Sani menggambarkan bahwa dalam film juga memuat unsur kesusasteraan berupa adanya unsur bercerita. Kombinasi penulis skenario dengan sutradara film yang menyampaikan cerita kepada masyarakat inilah yang mungkin menjadi dasar bagi Djamiluddin Malik, Usmar Ismail, dan Asrul Sani untuk lebih memajukan Lesbumi melalui film. Namun, meskipun minim dalam bidang kesusasteraan, bukan berarti Lesbumi tidak menghasilkan satu pun karya sastra. Asrul Sani yang sering memberi ceramah mengenai kebudayaan dalam hubungannya dengan agama Islam memberikan sumbangsuhnya dalam bentuk sebuah prosa. Chisaan (2008) menjelaskan bahwa kendati jarang menekuni bidang kesusasteraan, Asrul Sani melalui surat kabar harian *Duta Masyarakat* mampu menerbitkan sebuah prosa yang berjudul *Seminar Pangadjaran*.

Kepergian Asrul Sani untuk menunaikan ibadah haji tahun 1963 diperkirakan sebagai perjalanan untuk mengadakan persiapan dengan persiapan untuk memulai menggarap film *Panggilan Tanah Suci*. Film ini adalah film dakwah yang menceritakan problem kejiwaan dari beberapa orang terpelajar dalam menunaikan ibadah haji ke tanah suci, Mekkah. Film ini merupakan produksi bersama Departemen Agama RI, Departemen Penerangan RI, Persari Film, dan Sativa Film (Chisaan, 2008). Kepergian para pembuat film ini ke tanah suci selain menunaikan ibadah haji juga untuk menghindari penyingkiran orang-orang film yang akan dilakukan oleh Lekra.

Susanto (2018) menjabarkan orang yang disingkarkan Lekra antara lain adalah Usmar Ismail, Djamaluddin Malik, Suryo Sumanto, Asrul Sani, dan lain-lain yang tergabung dalam kepanitiaan FFAA (Festival Film Asia Afrika). Lekra beralasan bahwa penyingkiran ini bukan karena persoalan film saja, akan tetapi juga persoalan rakyat.

Barangkali, Lekra iri dengan pembuatan film *Panggilan Tanah Sutji* yang dipercayakan sepenuhnya pada Lesbumi. Apalagi Djamaluddin Malik percaya bahwa film ini akan mengalami kesuksesan karena adanya kontribusi besar dari Asrul Sani. Kesimpulan itu dapat dibuktikan ketika karya Asrul Sani yang berjudul *Titian Serambut Dibelah Tujuh* sukses menyampaikan pesan bahwa ayat-ayat Al-Qur'an bukan hanya dijadikan sebagai hukum yang mati saja, melainkan harus diamalkan dengan berbagai wujudnya.

Pengalaman Asrul Sani pergi haji juga dituliskan dalam esainya yang berjudul *Pertemuan Pertama dengan Baitullah* memberi makna tersendiri bagi kalangan NU. Asrul Sani dalam Chisaan (2008) mengaku bahwa ia memperoleh Pendidikan agama Islam dengan cukup baik dan dibesarkan di lingkungan orang beragama. Ibunya mempelajari agama dari para Syaikh dan kitab kuning. Sedangkan ayahnya adalah pembaca literatur agama yang sangat progresif, antara lain karya-karya A. Hassan, tokoh Persis yang terkemuka.

Setelah kepulangannya dari ibadah haji, Djamaluddin Malik, Usmar Ismail, Asrul Sani semakin lebih banyak terjun dalam dunia film. Film-film yang mereka sutradarai dipublikasikan melalui Studio Persari dengan tujuan agar nama Lesbumi semakin terkenal oleh masyarakat. Widariyanti (Widariyanti, 2022) menjelaskan bahwa

“Diantara film yang mereka buat melalui Studio Persari antara lain; Bajangan di Waktu Fajar pada tahun 1962, Pagar Kawat Berduri pada tahun 1963, Anak-anak Revolusi pada tahun 1964, dan Tauhid pada tahun 1964, Liburan Seniman pada tahun 1965. Asrul Sani yang menekuni bidang penulisan skenario turut menyumbangkan berbagai ide ke dalam perkembangan Lesbumi. Asrul Sani yang merupakan sastrawan Angkatan 45 menjelaskan bahwa hubungan antara sastra, teater, dan film cukup rumit untuk dijelaskan sehingga ketika ia mencari hubungan tersebut berarti Asrul Sani telah menghadapi suatu masalah yang cukup serius”.

Memang, salah satu keunggulan Lesbumi dibandingkan lembaga-lembaga kebudayaan lain adalah dalam merawat sebuah film. Rosidi (2017) memaparkan bahwa upaya Usmar Ismail dan Asrul Sani dalam mengarsipkan sebuah film sangat rapih jika dibandingkan dengan Lekra maupun Manifes Kebudayaan. Di sinematex yang merupakan pusat data, dokumentasi, dan informasi perfilman Indonesia, Usmar Ismail dan Asrul Sani menjadwalkan rutin agar selalu meluangkan waktu untuk merawat dan secara lengkap diurutkan.

Sementara itu, pada tahun 1965 Indonesia mengalami krisis politik dan hal itu berdampak pada industri film terutama film lokal yang memiliki kerugian besar. Ditambah lagi, datangnya film impor mendapat boikot dari PAPFIAS (Panitia

Pemboikotan Film-film Imperialis Amerika). Pemboikotan ini menurut Kurnia (2006) secara tidak langsung mempengaruhi bisnis bioskop di Indonesia saat itu sehingga dari 753 yang terdaftar hanya 350 yang mampu beroperasi.

Krisisnya industri film menyebabkan Asrul Sani memutar otak dengan mencari jalan keluar yang terbaik agar tetap dapat mengembangkan Lesbumi. Namun keseriusan untuk mengembangkan Lesbumi agaknya menemui jalan buntu. Sebab disaat yang sama, kedua orang temannya, Djamaluddin Malik dan Usmar Ismail masing-masing terlalu fokus dalam bidangnya masing-masing. Djamaluddin Malik perhatiannya lebih banyak dicurahkan ke NU (Chisaan, 2008), sedangkan Usmar Ismail sedang memimpin PT. Ria Sari (Chisaan, 2008). Usmar Ismail sudah mulai jarang tampil dalam harian *Duta Masyarakat* setelah esainya yang berjudul *Seniman Indonesia dan Karyanya* dipublikasikan.

Ketidakhadiran Djamaluddin Malik dalam kegiatan-kegiatan besar Lesbumi membuat Djamaluddin tidak bisa mengerahkan kekuatannya untuk mengembangkan Lesbumi. Hal ini tidak sesuai dengan yang telah dipaparkan oleh Schein (dalam Suprpto, hlm. 3) bahwa pemimpin dalam bidang seni dan budaya mengharuskan para pemimpin untuk mempunyai potensi yang paling besar dalam menanamkan budaya dan memperkuat aspek-aspek budaya dengan mekanisme antara lain; memberi perhatian, memberi reaksi terhadap krisis atau kendala yang terjadi, pemodelan peran, alokasi imbalan-imbalan, kriteria menseleksi dan memberhentikan karyawan. Fokusnya Djamaluddin ke NU, Usmar Ismail ke PT Ria Sari, dan Asrul Sani yang menjadi anggota DPR membuat Lesbumi mengalami kekosongan kepemimpinan. Padahal pengurus inti Lesbumi mempunyai potensi yang besar dalam bidangnya masing-masing, tapi itu justru membuat para petinggi tersebut lupa untuk menanamkan budaya Lesbumi, dan memperkuat aspek-aspek budaya Lesbumi. Hal ini kemudian yang menjadi alasan terkait keberadaan Lesbumi yang tidak lagi terlalu berpengaruh meskipun Lekra dan Manifes Kebudayaan yang merupakan Lembaga Kebudayaan dengan massa yang cukup besar telah dibubarkan.

Kesimpulan

Awal mula lahirnya Lesbumi dipicu oleh kebijakan Manifesto Politik yang mengakibatkan perbedaan pandangan antara kelompok Manifes Kebudayaan dengan kelompok Lekra. Akhirnya dalam upaya untuk menghendaki adanya kerjasama yang baik antara ulama, seniman, dan budayawan, serta untuk menengahi pertentangan antara Manifes Kebudayaan dan Lekra. Djamaluddin Malik, Usmar Ismail, dan Asrul Sani berinisiatif untuk mendirikan Lesbumi. Selain itu, kehadiran Lesbumi juga sebagai langkah awal NU dalam modernisasi kebudayaan.

Pandangan humanisme religius yang diusung oleh Lesbumi menjadi poin penting dalam perkembangan Lesbumi. Pandangan yang melandaskan pada

ketuhanan dan kemanusiaan itu tidak bisa dilarang oleh Soekarno. Hal ini dikarenakan pandangan tersebut turut membantu pemerintah untuk mempercepat revolusi Indonesia.

Kemajuan Lesbumi yang pesat membuat Djamaluddin Malik percaya kepada Usmar Ismail dan Asrul Sani bahwa tanpa kehadirannya, Lesbumi mampu untuk mengembangkan Lesbumi, apalagi Lesbumi mempunyai lembar kebuayaan *Duta Masyarakat*. Namun kepercayaan yang tinggi tersebut harus dibayar mahal karena meskipun *Duta Masyarakat* dibuat secara cepat, akan tetapi surat kabar harian itu nyatanya masih minim dalam hal penerbitan. Perhatian Djamaluddin Malik yang lebih banyak dicurahkan pada NU mengundang respon negatif dari para anggota-anggota yang berada dibawahnya, termasuk Usmar Ismail yang mempertanyakan pertanggungjawaban Djamaluddin Malik sebagai Ketua Umum Lesbumi.

Dalam upaya mengembangkan kesusastraan, Lesbumi sudah mempunyai modal awal berupa keberadaan Studio Persari Dalam bidang penerbitan, Lesbumi menghadirkan surat kabar kebudayaan yang bernama *Duta Masyarakat*. Selanjutnya, Lesbumi menerbitkan majalah mingguan yang dinamakan dengan Abad Muslimin, majalah harian yang dinamakan Muara, dan majalah bulanan yang dinamakan Gelanggang. Dibandingkan majalah dan surat kabar, Lesbumi lebih banyak berkontribusi dalam industri perfilman di Indonesia. Melalui Studio Persari, Lesbumi berhasil membuat beberapa film yang berkualitas. Adapun film-film yang berhasil dibuat ialah Bajangan di Waktu Fajar, Panggilan Tanah Suci, Di Belakang Pagar Kawat Berduri, Anak-anak Revolusi, Tauhid, dan Liburan Seniman.

Referensi

- Afidah, D. (2023). Meninjau Perjalanan Perumusan Dasar Negara hingga Penetapan Dekrit Presiden 1959. *Historia Madania: Jurnal Ilmu Sejarah*, 7(1), 67–80. <https://doi.org/10.15575/hm.v7i1.24424>
- Asmar, A. (2020). DAKWAH LESBUMI NU: SAPTAWIKRAMA. *JURNAL ISLAM NUSANTARA*, 4(1), 17. <https://doi.org/10.33852/jurnalin.v4i1.172>
- Azhari, D. R., Yoesoef, M., & Setyani, T. I. (2022). Mendiskusikan Definisi Sastra Islam dan Sastra Islami dalam Kesusastaan Indonesia Masa Kini. *Diglosia: Jurnal Kajian Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*, 5(4), 763–778. <https://doi.org/10.30872/diglosia.v5i4.518>
- Fitra, A. A., & Wendry, N. (2024). Penafsiran, Ideologi, dan Afiliasi Politik: Kritik Buya Hamka (1908-1981 M) terhadap Nasakom Era Demokrasi Terpimpin (1959-1966 M). *Istinarah: Riset Keagamaan, Sosial dan Budaya*, 6(2), 234. <https://doi.org/10.31958/istinarah.v6i2.13607>
- Goncing, N. (2015). *Nahdatul Ulama Politics and*. 1(1).

- Huda, N., Amni, W., & Fitriah, F. (2022). Lembaga Seniman dan Budayawan Muslimin Indonesia: Perannya Dalam Pengembangan Budaya Islam di Indonesia Era 1962-1967 M. *Tanjak: Sejarah dan Peradaban Islam*, 2(1), 97-107. <https://doi.org/10.19109/tanjak.v2i1.11979>
- Jurnaliston, R., & Suliyati, T. (2021). *Lembaga Seniman Yin Hua: Media Aktualisasi Seni Lukis Etnis Tionghoa, 1955-1965*. 2(1).
- Kaprisma, H. (n.d.). *CITRA RUSIA DALAM KARYA SASTRA INDONESIA PADA MASA ORDE LAMA DAN ORDE BARU*.
- Oktaviani, D. (n.d.). *Diajukan kepada Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga untuk Memenuhi Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Humaniora (S.Hum)*.
- Rahayu, M. (n.d.). *DINAMIKA KREATIFITAS SASTRAWAN: PRAMOEDYA ANANTA TOER DALAM SEJARAH SASTRA INDONESIA*.
- Slamet, Y. B. M. (2018). Fungsi dan Peran Karya Sastra dari Masa ke Masa. *PRAXIS*, 1(1), 24. <https://doi.org/10.24167/praxis.viii.1609>
- Susanti, N., Supriatna, N., & Sumantri, Y. K. (2019). Lekra Vs Manikebu: Perlawanan Majalah Sastra terhadap Politik Kebudayaan Pemerintah Masa Demokrasi Terpimpin (1961-1964). *FACTUM: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah*, 8(1), 97-112. <https://doi.org/10.17509/factum.v8i1.20121>
- Syarifuddin, A. I., Izzah, A. N. L., & Pd, M. (n.d.). *TRANSFORMASI DINAMIKA SASTRA DAN SENI DALAM MASYARAKAT MUSLIM INDONESIA*.
- Taum, Y. Y. (2013). *D. N. AIDIT, SASTRA, DAN GELIAT ZAMANNYA*. 7.
- Tayeb, F. F., & Amaruli, R. J. (2021). *Pemikiran Arief Budiman tentang Kesusastraan, 1966-1985: Dari Metode Ganzheit hingga Polemik Sastra Kontekstual*. 2(2).
- Widariyanti, C. (2022). EKSISTENSI LEKRA DALAM PUSARAN MANIFESTO KEBUDAYAAN DEMOKRASI TERPIMPIN. *ISTORIA: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sejarah*, 18(1). <https://doi.org/10.21831/istoria.v16i1.31408>